



**PEMERINTAH KOTA
PADANG PANJANG**

**LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA NO ... TAHUN 2025
TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026**

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
KOTA PADANG PANJANG**

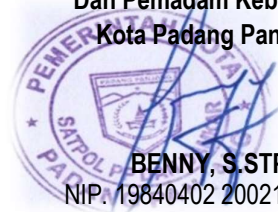
KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kehadiran Allah SWT, berkat karunia serta Ridho-Nya dokumen Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun 2026 telah dapat tersusun. Penyusunan dsokumen Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun 2026 ini merupakan gambaran yang akan dijadikan pedoman Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang dalam menjalankan program kerja selama 1 (satu) tahun, sehingga apa yang direncanakan dapat terwujud.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu saran dan masukan yang konstruktif sangat kami harapkan dalam rangka perbaikan dokumen Renja ini serta besar harapan kami semoga Dokumen Renja ini dapat menjadi pedoman dalam menyusun rangkaian pekerjaan selanjutnya. Semoga keberadaan dokumen ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu kami sehingga tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun 2026.

Padang Panjang, Agustus 2025

**Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Dan Pemadam Kebakaran
Kota Padang Panjang**



BENNY, S.STP,
NIP. 19840402 200212 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	3
	1.3 Maksud dan Tujuan	4
	1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	6
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Renstra Tahun 2024-2026	6
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	14
	2.3 Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	16
	2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD	19
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	24
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	25
	3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	24
	3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	36
	3.3 Program dan Kegiatan	38
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	45
BAB V	PENUTUP	59

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1	Rekapitulasi Hasil evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 7
Tabel 2.2	Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Keuangan Renja Perangkat Daerah dan Perkiraan Realisasi s/d Tahun 2025..... 12
Tabel 2.3	Pencapaian Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 14
Tabel 2.4	Identifikasi Permasalahan 16
Tabel 2.5	Isu-isu Strategis Pembangunan Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 18
Tabel 2.6	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 dengan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun 2026 20
Tabel 3.1	Tujuan, Sasaran dan Indikator Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2026 30
Tabel 3.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2024-2026 37
Tabel 3.3	Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 40
Tabel 4.1	Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun 2026 46

DAFTAR GAMBAR

		Hal
Gambar 1.1	Tahapan Penyusunan Renja Satpol PP Damkar Kota Padang Panjang	2
Gambar 1.2	Hubungan Antar Dokumen Terhadap Renja PD	3
Gambar 2.1	Pohon Masalah Satpol PP Damkar Kota Padang Panjang	17

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri atas 6 (enam) tahapan yaitu tahap persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, penyusunan forum Perangkat Daerah/ lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Perangkat Daerah menyusun rancangan awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu "Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun"

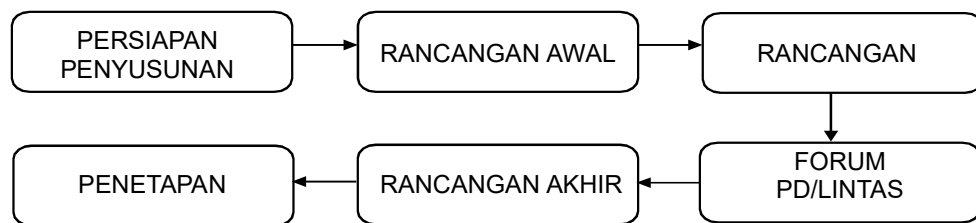
Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan "Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD." Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Proses penyusunan rancangan awal Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2026 didasarkan pada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 2025-2029 dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam Ranwal RKPD Tahun 2025. Tahun 2026 merupakan tahun ketiga perencanaan pembangunan Kota Padang Panjang yang berpedoman pada Renstra-PD TAHUN 2025-2029. Dokumen Renja Tahun 2026 disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran serta sejalan dengan tujuan RPD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 yaitu "Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis".

Penyusunan Renja PD dilakukan melalui tahapan, meliputi :

1. Persiapan penyusunan
Meliputi pembentukan tim penyusun Renja PD Tahun 2026, Pengumpulan hasil evaluasi renja 2024, pengendalian kegiatan tahun 2025.
2. Tahap perumusan rancangan Renja PD, meliputi :
 - a. Pengolahan data dan informasi
 - b. Analisis gambaran pelayanan PD
 - c. Mereviu hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu berdasarkan Renstra PD
 - d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD
 - e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD
 - f. Perumusan tujuan dan sasaran
 - g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat
 - h. Perumusan kegiatan prioritas
 - i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja PD
 - j. Penyempurnaan rancangan Renja PD
 - k. Pembahasan forum PD
3. Penyusunan rancangan
Sinkronisasi dan dilaksanakan oleh Tim Penyusun Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2026, Masukan dari pelaksana kegiatan pembahasan oleh tim Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran serta pembahasan Tim Renja Kota.
4. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
5. Tahap penyajian rancangan Renja PD, sesuai dengan sistematika yang telah ditetapkan dalam bentuk rancangan akhir
6. Tahap Penetapan Rencana Kerja PD

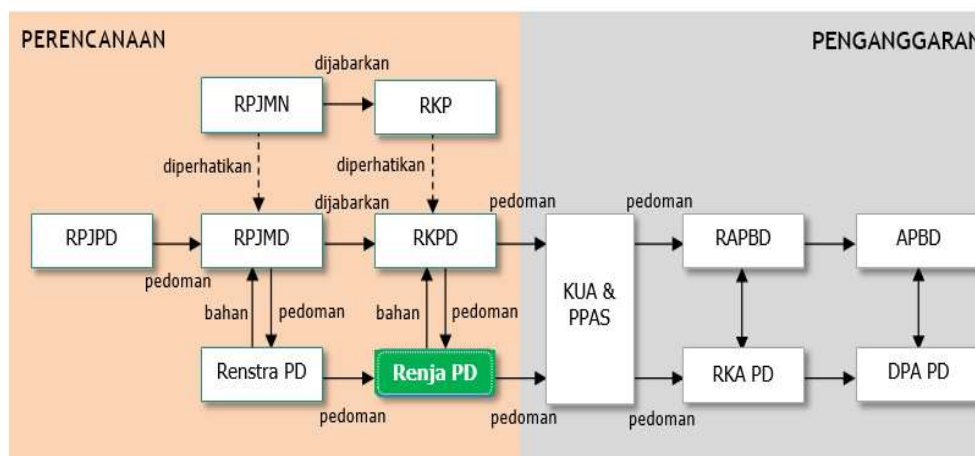
GAMBAR 1.1
Tahapan Penyusunan Renja Satpol PP Damkar Kota Padang Panjang



Sumber: Bappeda Kota Padang Panjang

Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun 2026 adalah penjabaran dari Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2025-2029, untuk melihat hubungan antar dokumen dapat kita lihat pada tabel berikut:

Gambar 1.2
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD



Sumber: Bappeda Kota Padang Panjang

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun 2025 berlandaskan pada Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 288);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1419);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 19);
13. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 11 Seri E.6);
14. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2013 Nomor 2 Seri E.1);
15. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
16. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025 Nomor 2);
17. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 31 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
18. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 13 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2026 dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran secara berkesinambungan.

Adapun tujuan penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang tahun 2026 adalah:

1. Sebagai pedoman pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 31 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran melalui program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun Anggaran 2026.
2. Sebagai salah satu dokumen acuan dalam penyusunan RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2026.
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan RKA PD Tahun Anggaran 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 31 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun 2025 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan**
Memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.
- Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu**
Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu (2024) dan perkiraan capaian tahun berjalan (2025) serta keterkaitan dengan pencapaian Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun sebelumnya, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD, review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.
- Bab III Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah**
Memuat tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja PD, serta Program dan kegiatan.
- Bab IV Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah**
Memuat Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan tahun n dan Perkiraan Maju tahun n+1
- Bab V Penutup**
Memuat tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Renstra Tahun 2025-2029

Kualitas Renja PD yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Renja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja PD tahun sebelumnya, dikaitkan dengan pencapaian Renstra PD. Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja PD tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan juga hambatan/permasalahan yang dihadapi.

Dalam melakukan penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakakaran Kota Padang Panjang Tahun 2026, perlu diperhatikan hasil evaluasi Renja PD Tahun 2025 terhadap capaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakakaran Tahun 2025-2029, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2025. Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakakaran sampai dengan tahun berjalan yaitu Tahun 2025 terhadap target kinerja Tahun 2025. Hal ini juga perlu dilihat hasil evaluasi terhadap capaian Renstra PD Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakakaran Tahun 2024-2026 dengan kinerja Tahun 2024 (tahun pertama).

1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2025-2029 sampai dengan Tahun 2025

Secara umum, pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakakaran Kota Padang Panjang Tahun 2024, dapat terlaksana sesuai dengan target rencana yang telah ditetapkan, dengan rata-rata realisasi fisik telah mencapai 100%. Begitu juga berdasarkan hasil revidu berdasarkan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakakaran Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 realisasi capaian kinerja mencapai 100%.

Secara lebih terperinci hasil evaluasi pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakakaran Kota Padang Panjang Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025
Kota Padang Panjang

Nama Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakakaran

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (Renstra 2024-2026)	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2)			Target program dan kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Tahun 2025	
					Target Renja OPD tahun 2024	Realisasi Renja OPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 =9	11
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
1 05 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100%	100,00%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1 05 01 2.02	Administrasi Keuangan	Persentase layanan keuangan perangkat daerah	90%	90%	90%	100%	100%	90%	90%	100%
1 05 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	574 orang	688 orang	574 orang	688 orang	119%	574 orang	574 orang	100%
1 05 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1 05 01 2.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	39 paket	221 paket	221 paket	221 orang	100%			
1 05 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	90%	90%	100%
1 05 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4 paket	4 paket	4 paket	4 paket	100%	4 paket	4 paket	100%
1 05 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	4 paket	4 paket	4 paket	4 paket	100%	12 paket	12 paket	100%
1 05 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	4 paket	3 paket	3 paket	3 paket	100%	5 paket	5 paket	100%
1 05 01 2.06 0009	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	24 laporan	62 laporan	24 laporan	62 laporan	258%	24 laporan	24 laporan	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (Renstra 2024-2026)	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2)			Target program dan kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Tahun 2025	
					Target Renja OPD tahun 2024	Realisasi Renja OPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi (%)
1 05 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	90%					90%	90%	100%
1 05 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 unit					4 unit	4 unit	100%
1 05 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah	90%	100%	90%	90%	100%	90%	90%	100%
1 05 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%
1 05 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	36 laporan	36 laporan	36 laporan	36 laporan	100%	36 laporan	36 laporan	100%
1 05 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 laporan	14 laporan	12 laporan	14 laporan	116%	12 laporan	12 laporan	100%
1 05 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah	90%	90%	100%	90%	100%	90%	90%	100%
1 05 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	26 unit	26 unit	26 unit	26 unit	100%	26 unit	26 unit	100%
1 05 01 2.09 0008	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	30 unit	30 unit	30 unit	30 unit	100%	30 unit	30 unit	100%
1 05 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	100%	2 unit	2 unit	100%
1 05 02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase warga negara yang terlindungi dari dampak pelanggaran perda dan trantibum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1 05 02 2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah operasi pencegahan dan penanganan gangguan trantibum	3 operasi	3 operasi	3 operasi	3 operasi	100%	3 operasi	3 operasi	100%
1 05 02 2.01 0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban umum	Jumlah dokumen hasil pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban umum	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	-	-	
1 05 02 2.01 0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah kasus gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dicegah melalui deteksi dini dan cegah dini pembinaan dan penyuluhan pelaksanaan patroli pengamanan dan pengawasan	60 kasus	102 kasus	60 kasus	102 kasus	170%	55 kasus	55 kasus	100%
1 05 02 2.01 0016	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Pengananan Unjuk rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Pengananan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	2 laporan							

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (Renstra 2024-2026)	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2)			Target program dan kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Tahun 2025	
					Target Renja OPD tahun 2024	Realisasi Renja OPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi (%)
1 05 02 2.01 0017	Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah operasi pencegahan dan penanganan gangguan trantibum	8 laporan	8 laporan	1 laporan	8 laporan	100%	8 laporan	8 laporan	100%
1 05 02 2.01 0018	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum yang tersedia	1 unit					5 unit	5 unit	100%
1 05 02 2.02	Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah operasi penegakan Perda	2 operasi	100%	1 operasi	100%	100%	1 operasi	1 operasi	100%
1 05 02 2.02 0010	Sosialisasi Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 laporan							
1 05 02 2.02 0011	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	4 laporan	8 laporan	8 laporan	8 laporan	100%	2 laporan	2 laporan	100%
1 05 02 2.03	Pembinaan Penyidikan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pembinaan Penyidikan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	1 Kegiatan							
1 05 02 2.03 0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Kapasitas pejabat PPNS Penegak Perda	1 Kegiatan							
1 05 04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Waktu Tanggap (Respon Time Rate) daerah	10 menit	4 menit	10 menit	4 menit	4 menit	10 menit	10 menit	100%
1 05 04 2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis kegiatan pencegahan pengendalian pemadaman kebakaran	4 kegiatan	1 kegiatan	2 kegiatan	1 kegiatan	50%	2 kegiatan	2 kegiatan	100%
1 05 04 2.01 0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Picket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	15 Laporan	12 Laporan	15 Laporan	12 Laporan	80%	15 Laporan	15 Laporan	100%
1 05 04 2.01 0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	2 orang							
1 05 04 2.01 0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal sesuai Standar Teknis Terkait	2 unit					4 unit	4 unit	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (Renstra 2024-2026)	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2)			Target program dan kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Tahun 2025	
					Target Renja OPD tahun 2024	Realisasi Renja OPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi (%)
1 05 04 2.01 0017	Pelatihan keluarga tanggap kebakaran rumah tangga	Jumlah keluarga mengikuti pelatihan keluarag tanggap kebakaran rumah tangga	16 keluarga							
1 05 04 2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah kegiatan pemberdayaan	2 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	50%	1 kegiatan	1 kegiatan	100%
1 05 04 2.04 0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	50 orang					50 orang	50 orang	100%
1 05 04 2.04 0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	16 kelurahan	16 kelurahan	16 kelurahan	16 kelurahan	100%	16 kelurahan	16 kelurahan	100%
1 05 04 2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Persentase pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100%	100 Persen	100 Persen	100%
1 05 04 2.05 001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	12 Laporan	134 Laporan	12 Laporan	134 Laporan	1117%	12 Laporan	12 Laporan	100%
1 05 04 2.05 0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	0 unit					5 unit	5 unit	100%
	RENSTRA 2025-2029									

Berdasarkan Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 Kota Padang Panjang diatas dapat dijelaskan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran melaksanakan 3 Program Kegiatan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Program Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Yang Dipenuhi target 100 % capaian kinerja tahun 2024 sebesar 100% persentasenya 100%, program ini terdiri dari 5 kegiatan dan 12 sub kegiatan dengan persentase capaian kinerjanya 100%.
2. Program Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum dengan indikator kinerja Persentase warga negara yang terlindungi dari dampak pelanggaran perda dan trantibum target kinerja tahun 2024 sebesar 100 % dengan capaian 100% persentase capaian 100%, program ini terdiri dari 2 Kegiatan dengan 4 sub kegiatan yang dilaksanakan persentase capaian 100%. Sementara itu ada 2 (dua) sub kegiatan yang dihilangkan pada perubahan APBD Tahun 2024 yaitu sub kegiatan Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum dan Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penganan unjuk rasa dan kerusuhan masa.
3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran dengan indikator program Waktu tanggap (Respon Time Rate) Daerah dengan target tahun 2024 10 menit dengan capaian 4 menit dari 12 kejadian kebakaran di Kota Padang Panjang semua tertangani kurang dari 10 menit jangka waktu response time yang telah di targetkan.

2. Evaluasi Terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun 2024. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan Tahun 2024 dan anggaran tahun 2025 beserta perkiraan target realisasi anggaran disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Keuangan Renja Perangkat Daerah dan Perkiraan
Realisasi s/d Tahun 2025

Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (Renstra 2024-2026)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Anggaran program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (Rp)	Perkiraan Realisasi Capaian Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2024)	
		Anggaran Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (Rp)	Realisasi Anggaran Perangkat Daerah tahun 2024 (Rp)	Tingkat Realisasi (%)		Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025
1	2	3	4	5 = 4/3	6	7	8 = 7/6
1 05 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	6.643.655.293	6.595.194.649	99,27%	7.538.537.145	7.538.537.145	100%
1 05 01 2.02	Administrasi Keuangan	5.661.317.593	5.654.678.751	99,88%	6.029.567.805	6.029.567.805	100%
1 05 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.661.317.593	5.654.678.751	99,88%	6.029.567.805	6.029.567.805	100%
1 05 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	104.400.000	98.685.000	94,53	280.704.740	280.704.740	100%
1 05 01 2.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	104.400.000	98.685.000	94,53	280.704.740	280.704.740	100%
1 05 01 2.06	Administrasi Umum	244.448.800	238.345.864	97,50%	280.704.740	280.704.740	100%
1 05 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.971.200	2.968.400	99,91%	2.715.400	2.715.400	100%
1 05 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16.804.200	16.748.500	99,67%	14.739.340	14.739.340	100%
1 05 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.340.400	11.110.300	97,97%	15.007.000	15.007.000	100%
1 05 01 2.06 0009	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	213.333.000	207.518.664	97,27%	248.243.000	248.243.000	100%
1 05 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				149.349.600	149.349.600	100%
1 05 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				149.349.600	149.349.600	100%
1 05 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	121.277.100	120.838.284	99,64%	136.655.200	136.655.200	100%
1 05 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.064.400	2.950.000	96,27%	3.880.000	3.880.000	100%
1 05 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.741.500	20.560.076	99,13%	35.384.000	35.384.000	100%
1 05 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	97.471.200	97.328.208	99,85%	97.391.200	97.391.200	100%
1 05 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	512.211.800	482.646.750	94,23%	942.259.800	942.259.800	100%
1 05 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	425.591.000	397.602.750	93,42%	864.847.000	864.847.000	100%
1 05 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.164.800	13.909.000	98,19%	29.252.800	29.252.800	100%
1 05 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	72.456.000	71.135.000	98,18%	48.160.000	48.160.000	100%
1 05 02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4.260.508.500	4.252.673.364	99,82%	3.888.261.100	3.888.261.100	100%
1 05 02 2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4.031.483.500	4.024.098.364	99,82%	3.670.296.300	3.670.296.300	100%
1 05 02 2.01 0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	302.132.900	297.663.230	98,52%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (Renstra 2024-2026)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Anggaran program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (Rp)	Perkiraan Realisasi Capaian Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2024)	
		Anggaran Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (Rp)	Realisasi Anggaran Perangkat Daerah tahun 2024 (Rp)	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025	
1	2	3	4	5 = 4/3	6	7	8 = 7/6
1 05 02 2.01 0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	3.729.350.600	3.726.435.134	99,92%	3.605.527.400	3.605.527.400	100%
1 05 02 2.01 0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah				5.432.400	5.432.400	100%
1 05 02 2.01 0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum				59.336.500	59.336.500	100%
1 05 02 2.02	Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	229.025.000	228.575.000	99,80%	217.964.800	217.964.800	100%
1 05 02 2.02 0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	0	0	00,00%	27.504.800	27.504.800	100%
1 05 02 2.02 0011	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	229.025.000	228.575.000	99,80%	190.460.000	190.460.000	100%
1 05 04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.098.039.700	1.084.454.286	98,76%	940.286.000	940.286.000	100%
1 05 04 2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.037.646.400	1.028.429.136	99,11%	789.346.600	789.346.600	100%
1 05 04 2.01 0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.037.646.400	1.028.429.136	99,11%	537.876.600	537.876.600	100%
1 05 04 2.01 0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana	1.037.646.400	1.028.429.136	99,11%	251.470.470	251.470.470	100%
1 05 04 2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	53.949.300	49.586.100	91,91%	66.515.150	66.515.150	100%
1 05 04 2.04 0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi masyarakat				25.728.350	25.728.350	100%
1 05 04 2.04 0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	53.949.300	49.586.100	91,91%	40.786.800	40.786.800	100%
1 05 04 2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	6.444.000	6.439.050	99,92%	84.424.250	84.424.250	100%
1 05 04 2.05 0002	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	6.444.000	6.439.050	99,92%	17.740.000	17.740.000	100%
1 05 04 2.05 0005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri				66.684.250	66.684.250	100%

Berdasarkan hasil evaluasi Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029, capaian kinerja tahun anggaran 2024 dapat terlaksana dengan baik dengan 3 (tiga) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 19 (sembilan belas) sub kegiatan, yang ada semuanya memenuhi target pelaksanaan kegiatan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugas dan fungsi tidak dapat bertindak secara sendiri karena berkaitan dengan organisasi lainnya baik swasta/ lembaga lainnya. Untuk itu dalam penyelenggaraan tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran senantiasa mengedepankan koordinasi dan kerjasama yang baik dalam menyelenggarakan pembinaan masyarakat, menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, serta penanggulangan kebakaran diantaranya melakukan kegiatan pembinaan masyarakat dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan secara terus menerus, dalam upaya pemeliharaan trantibum dan penegakan peraturan daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran menyelenggarakan tindakan di lapangan berserta aparat kepolisian, kejaksaan, TNI dan instansi terkait lainnya baik berupa operasi yustisi, patroli, pengawasan, monitoring serta operasi penertiban.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang, mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran, target evaluasi capaian kinerja sasaran “Meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah” dengan indikator Persentase Penegakan Perda untuk tahun 2024 dengan target sebesar 100%. Disamping itu juga dilakukan pengukuran terhadap capaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci yang sudah ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

NO	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian (Tahun)			Proyeksi (Tahun)			Catatan Analisis	
				2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=	12	13	14	
T	Tingkat penyelesaian pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						Terpenuhi sesuai dengan target
S	Persentase Penegakan PERDA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						Terpenuhi sesuai dengan target
S	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) daerah layanan WMK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						Terpenuhi sesuai dengan target
IP	Persentase warga negara yang terlindungi dari dampak pelanggaran perda dan trantibum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						Terpenuhi sesuai dengan target
IP	Waktu Tanggap (Respon Time Rate) daerah			10 menit	10 menit	10 menit	4 menit	4 menit						Terpenuhi sesuai dengan target

Adapun hasil analisis dari pencapaian target tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tahun 2024 tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Tujuan “Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum” dengan indikator kinerja “Tingkat penyelesaian pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum” Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja”. Pada tahun 2024 adalah sebesar 100%.
2. Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut :

- a. Sasaran Meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dengan indikator Persentase Penegakan Perda yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang terealisasi 100% artinya seluruh masyarakat Kota Padang Panjang memperoleh layanan akibat dari penegakkan hukum Perda dan Perkada. Dari Jumlah 8 kejadian pelanggaran Perda dan Perkada pada tahun 2024 semuanya terlayani. Hal ini hal ini dapat tercapai dengan upaya:
 - 1) Melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
 - 2) Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - 3) Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/ atau Perkada; dan
 - 4) Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.
 - 5) Pembentukan Tim SK4 yang melibatkan unsur TNI, Polri, dan instansi terkait.
- b. Sasaran Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dengan indikator Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) daerah layanan WMK yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang terealisasi 100% artinya seluruh masyarakat Kota Padang Panjang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran. Dari jumlah 12 kejadian yang seharusnya dilayani semuanya terlayani. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal berupa: layanan respon cepat (Response Time) penanggulangan kejadian kebakaran, layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran, layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi semuanya telaksana dengan baik.

Beberapa upaya yang dilakukan :

- 1) Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam kota dengan melaksanakan sosialisasi ke sekolah dan instansi- instansi pemerintah dan swasta yang ada dalam Kota Padang Panjang.

- 2) Inspeksi peralatan proteksi kebakaran.
- 3) Investigasi kejadian kebakaran.
- 4) Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

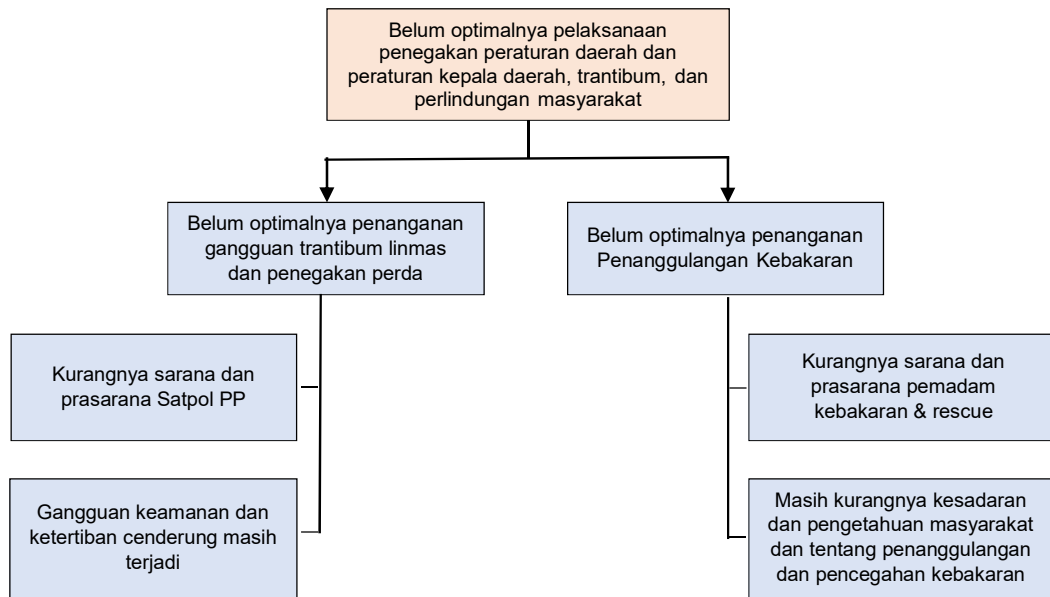
Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman di tengah masyarakat akan terkendala oleh beberapa permasalahan seiring dengan perkembangan dinamika di dalam masyarakat. Hal tersebut mempengaruhi dari hasil akhir yang ingin dicapai dalam pelayananan Penegakkan Perda, penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta penanggulangan kebakaran yang diperankan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Untuk lebih jelasnya mengenai identifikasi permasalahan dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.4
Identifikasi Permasalahan

No.	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Belum optimalnya pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, trantibum, dan perlindungan masyarakat	Belum optimalnya penanganan gangguan trantibum linmas dan penegakan perda	Kurangnya sarana dan prasarana Satpol PP
2			Gangguan keamanan dan ketertiban cenderung masih terjadi
3		Belum optimalnya penanganan Penanggulangan Kebakaran	Kurangnya sarana dan prasarana pemadam kebakaran & rescue
4			Masih kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat dan instansi/lembaga tentang penanggulangan dan pencegahan kebakaran dan non kebakaran

Gambar 2.1
POHON MASALAH
SATPOL PP DAMKAR KOTA PADANG PANJANG



Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang, diperoleh gambaran mengenai berbagai persoalan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penegakan Peraturan Daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan penanggulangan kebakaran. Permasalahan-permasalahan tersebut kemudian dirumuskan dalam bentuk *pohon masalah* (Gambar 2.1) untuk memetakan akar penyebab, kondisi inti, dan dampak yang ditimbulkan.

Dengan demikian isu strategis yang dirumuskan pada Renstra Satpol PP dan Damkar Kota Padang Panjang tahun 2025–2029 mencakup: (1) optimalisasi penanganan gangguan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan penegakan perda; (2) peningkatan kecepatan dan efektivitas respon dalam penanggulangan kebakaran; serta (3) penguatan sarana, prasarana, dan kapasitas kelembagaan dalam mendukung pelayanan publik yang aman, tertib, dan tanggap terhadap perubahan lingkungan strategis. Berikut ini tabel permasalahan dan isu strategis Satpol PP dan Damkar Kota Padang Panjang

Tabel 2.5
Perumusan Permasalahan dan Isu Strategis Satpol PP dan Damkar Kota Padang Panjang

No	Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan	Permasalahan Satpol PP	Isu KLHS yang Relevan dengan Satpol PP	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Satpol PP dan Damkar			Isu Strategis Satpol PP dan Damkar
				Global	Nasional	Regional	
1	Penegakan Perda dan Ketertiban Umum	Belum optimalnya penanganan gangguan trantibum linmas dan penegakan perda	Kurangnya tata kelola lingkungan yang tertib dan tentram serta adanya potensi kebakaran	Mobilitas masyarakat dunia yang tinggi, cepat dan mudah	Perubahan kebijakan dan peraturan	Adanya gangguan trantibum lintas regional serta pelanggaran Perda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya penanganan gangguan trantibum linmas dan penegakan perda 2. Tuntutan masyarakat atas penanganan pelanggaran trantibum yang harus cepat dan preventif
2	Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Belum optimalnya penanganan penanggulangan kebakaran		Perubahan iklim yang meningkatkan risiko kebakaran	Tingginya angka kebakaran di kawasan padat penduduk	Kurangnya sarana dan prasarana Damkar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Respon time yang masih tinggi 2. Penambahan luas wilayah pemukiman di Kota Padang Panjang menyebabkan perlunya pengoptimalan peran pemadam kebakaran

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang

Secara umum isu utama Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi adalah isu tatanan kehidupan masyarakat khususnya terkait layanan ketentraman dan ketertiban umum.

Berdasarkan reviu penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran selama periode sebelumnya, serta berdasarkan permasalahan dan hambatan yang ada, dapat diidentifikasi isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya dan masih kurangnya tingkat kesadaran masyarakat untuk menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- b. Masih tingginya potensi pelanggar peraturan daerah, gangguan ketenteraman masyarakat, dan ketertiban umum di dalam masyarakat.
- c. Belum lengkapnya pemenuhan sarana dan prasarana penunjang

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD. Mengingat keterbatasan kapasitas keuangan berdasarkan perhitungan proyeksi kondisi keuangan Kota Padang Panjang pada rancangan awal RKPD, maka ada beberapa program dan kegiatan pada Renja dijadikan program dan kegiatan prioritas kedua. Untuk lebih jelasnya reviu terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2026. Kota Padang Panjang dapat dijelaskan melalui Tabel 2.4.

Tabel 2.6
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Dengan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun 2026

No	Kode	Rancangan Awal RKPD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Selisih	Catatan Penting
		Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-6	12
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN				9.977.765.786					10.856.750.147	(878.984.361)	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				9.977.765.786					10.856.750.147	(878.984.361)	
	1.05.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				9.977.765.786					10.856.750.147	(878.984.361)	
1	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Padang Panjang	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	100 Persen	6.667.851.736	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Padang Panjang	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	100 Persen	6.814.120.993	(110.149.257)	
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Padang Panjang	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	90 Persen	5.943.220.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Padang Panjang	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	90 Persen	6.097.798.993	(118.458.993)	
	1.05.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Padang Panjang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	574 Orang/bulan	5.907.100.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Padang Panjang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	574 Orang/bulan	6.061.678.993	(154.578.993)	
	1.05.01.2.02.003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Orang/bulan	36.120.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Orang/bulan	36.120.000	0	
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Padang Panjang	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	90 Persen	107.507.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Padang Panjang	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	90 Persen	113.715.000	(6.208.000)	
	1.05.01.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Padang Panjang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	2.500.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Padang Panjang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket	2.715.000	(215.000)	
	1.05.01.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Padang Panjang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	15.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Padang Panjang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	15.000.000	0	
	1.05.01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Padang Panjang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	10.007.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Padang Panjang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	10.000.000	7.000	
	1.05.01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 laporan	80.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 laporan	86.000.000	(6.000.000)	
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Padang Panjang	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	90 Persen	536	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Padang Panjang	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	90 Persen	2.000.000	(1.999.464)	
	1.05.01.2.07.002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Padang Panjang	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	436	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Padang Panjang	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	1.000.000	(999.564)	
	1.05.01.2.07.006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Padang Panjang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 unit	100	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Padang Panjang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 unit	1.000.000	(999.900)	
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Padang Panjang	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 Persen	100.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Padang Panjang	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 Persen	1.128.000	(1.028.000)	

No	Kode	Rancangan Awal RKPD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Selisih	Catatan Penting
		Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)		
	1.05.01.2.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Padang Panjang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	172 paket	100.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Padang Panjang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	172 paket	1.128.000	(1.028.000)	
	X..XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Padang Panjang	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	90 Persen	111.744.800	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Padang Panjang	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	90 Persen	147.200.000	(35.455.200)	
	X..XX.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	4.004.800	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	4.000.000	4.800	
	X..XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	25.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	25.000.000	0	
	X..XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	82.740.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	118.200.000	(35.460.000)	
	X..XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Padang Panjang	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	90 Persen	505.279.400	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Padang Panjang	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	90 Persen	452.279.000	53.000.400	
	X..XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Padang Panjang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	445.279.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Padang Panjang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	392.279.000	53.000.000	
	X..XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Padang Panjang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	20.012.400	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Padang Panjang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	20.000.000	12.400	
	X..XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Padang Panjang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	39.988.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Padang Panjang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	40.000.000	(12.000)	
2	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kota Padang Panjang	Persentase warga negara yang terlindungi dari dampak pelanggaran perda dan trantibum	100 Persen	2.968.423.900	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kota Padang Panjang	Persentase warga negara yang terlindungi dari dampak pelanggaran perda dan trantibum	100 Persen	3.575.469.000	(607.045.500)	
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang	Jumlah operasi pencegahan dan penanganan gangguan trantibum	5 operasi	2.603.047.400	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang	Jumlah operasi pencegahan dan penanganan gangguan trantibum	5 operasi	3.553.000.000	(949.952.600)	
	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Keterlibatan Umum	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Keterlibatan Umum	1 Dokumen	100	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Keterlibatan Umum	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Keterlibatan Umum	1 Dokumen	1.000.000	(999.900)	
	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	55 laporan	2.602.980.000	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	55 laporan	3.549.000.000	(946.020.000)	
	1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	2 laporan	150	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	1 laporan	1.000.000	(999.850)	

No	Kode	Rancangan Awal RKPD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Selisih	Catatan Penting
		Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)		
	1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga yang terdampak Penegakan Perda dan Perkada	2 laporan	250	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga yang terdampak Penegakan Perda dan Perkada	2 laporan	1.000.000	(999.750)	
	1.05.02.2.01.0018	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum	Kota Padang Panjang	Jumlah sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum yang tersedia	1 unit	66.900	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum	Kota Padang Panjang	Jumlah sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum yang tersedia	22 unit	1.000.000	(933.100)	
	1.05.02.2.02.	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kota Padang Panjang	Jumlah operasi penegakan Perda	2 operasi	365.376.400	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kota Padang Panjang	Jumlah operasi penegakan Perda	2 operasi	21.469.000	343.907.000	
	1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 Laporan	26.326.400	Sosialisasi Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 Laporan	20.469.000	5.857.000	
	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	8 Laporan	339.050.000	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	6 Laporan	1.000.000	338.050.000	
	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota	Kota Padang Panjang	Jumlah Kegiatan Pembinaan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota	1 kegiatan	100	Pembinaan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota	Kota Padang Panjang	Jumlah Kegiatan Pembinaan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota	1 kegiatan	1.000.000	(999.900)	
	1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan karier PPNS	Kota Padang Panjang	Jumlah laporan hasil pengembangan dan peningkatan kapasitas pejabat PPNS Penegak Perda	1 Laporan	100	Pengembangan Kapasitas dan karier PPNS	Kota Padang Panjang	Jumlah laporan hasil pengembangan dan peningkatan kapasitas pejabat PPNS Penegak Perda	1 Laporan	1.000.000	(999.900)	
3	1.05.04.	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Kota Padang Panjang	Waktu tanggap (Respon Time Rate) Daerah	10 Menit	341.490.150	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Kota Padang Panjang	Waktu tanggap (Respon Time Rate) Daerah	10 Menit	467.160.154	(125.670.004)	
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang	Jumlah Jenis kegiatan pencegahan pengendalian pemadaman kebakaran	4 kegiatan	287.980.450	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang	Jumlah Jenis kegiatan pencegahan pengendalian pemadaman kebakaran	4 kegiatan	412.650.000	(124.669.550)	
	1.05.04.2.01.0007	Pembinaan aparatur pemadam kebakaran	Kota Padang Panjang	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memiliki sertifikasi keterampilan teknis dan analisis dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran	1 orang	8.500.000	Pembinaan aparatur pemadam kebakaran	Kota Padang Panjang	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memiliki sertifikasi keterampilan teknis dan analisis dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran	2 orang	8.500.000	0	
	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Kota Padang Panjang	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	1 unit	350	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Kota Padang Panjang	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	1 unit	1.000.000	(999.650)	
	1.05.04.2.01.0019	Pelatihan keluarga tanggap kebakaran rumah tangga	Kota Padang Panjang	Jumlah keluarga mengikuti pelatihan keluarag tanggap kebakaran rumah tangga	10 keluarga	100	Pelatihan keluarga tanggap bencana	Kota Padang Panjang	Jumlah keluarga mengikuti pelatihan keluarag tanggap kebakaran rumah tangga	10 keluarga	1.000.000	(999.900)	
	1.05.04.2.01.0026	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Picket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	15 Laporan	279.480.000	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Picket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	15 Laporan	402.150.000	(122.670.000)	
	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Kota Padang Panjang	Jumlah kegiatan pemberdayaan	2 kegiatan	49.974.700	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Kota Padang Panjang	Jumlah kegiatan pemberdayaan	2 kegiatan	50.010.154	(35.454)	

No	Kode	Rancangan Awal RKPD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Selisih	Catatan Penting
		Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)		
	1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan penanggulangan Kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	Kota Padang Panjang	Jumlah warga masyarakat yang mendapatkan sosialisasi dan edukasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran tiap tahunnya	50 orang	17.405.600	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan penanggulangan Kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	Kota Padang Panjang	Jumlah warga masyarakat yang mendapatkan sosialisasi dan edukasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran tiap tahunnya	50 orang	17.400.000	5.600	
	1.05.04.2.04.0001	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Kota Padang Panjang	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	16 Desa/Kelurahan	32.569.100	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Kota Padang Panjang	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	16 Desa/Kelurahan	32.610.154	(41.054)	
	1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Kota Padang Panjang	Persentase pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia	100 Persen	3.535.000	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Kota Padang Panjang	Persentase pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia	100 Persen	4.500.000	(965.000)	
	1.05.04.2.05.0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	12 Laporan	3.500.000	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	12 Laporan	3.500.000	0	
	1.05.04.2.05.0005	Pengadaan sarana dan prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap kondisi Membahayakan manusia/penyelamatan dan edukasi	Kota Padang Panjang	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan terhadap kondisi Membahayakan manusia/penyelamatan dan edukasi sesuai dengan standar teknis	1 unit	35.000	Pengadaan sarana dan prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap kondisi Membahayakan manusia/penyelamatan dan edukasi	Kota Padang Panjang	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan terhadap kondisi Membahayakan manusia/penyelamatan dan edukasi sesuai dengan standar teknis	1 unit	1.000.000	(965.000)	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang dalam proses penyusunan perencanaan telah mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang, yaitu melalui Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijangin berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis. Namun Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran juga memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan-usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait.

Pada Musrenbang RKPD ada satu usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran selaku Organisasi Perangkat Daerah baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan Organisasi Perangkat Daerah Kota Padang Panjang maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Secara umum tujuan pembangunan daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang merupakan wujud pencapaian visi dan misi rencana pembangunan jangka menengah daerah. Tujuan pembangunan dijabarkan dan ditunjukkan dengan jelas pada sasaran yang dirumuskan secara spesifik untuk mewujudkan tujuan pembangunan yang ingin dicapai. Oleh sebab itu untuk mewujudkan tujuan pembangunan sebagaimana dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah perlu dirumuskan berdasarkan kondisi, permasalahan, potensi serta dinamika yang terjadi di tengah masyarakat. Dinamika dalam pembangunan daerah tidak hanya diperhatikan secara spasial, artinya tidak hanya memperhatikan dinamika di lingkup satu wilayah saja, melainkan juga dengan memperhatikan dinamika yang terjadi secara regional maupun nasional. Untuk itu dalam menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah juga harus disinergikan dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah provinsi dan nasional.

3.1.1. Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2026

Sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Dalam 2025-2029 dirancang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025. Ditetapkan visi Tahun 2025-2029 yaitu :

“Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045.”

Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan delapan misi strategis sebagai arah pembangunan jangka menengah sebagai berikut :

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;

6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, bahwa kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yaitu visi ke 2 Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Kemudian faktor-faktor penghambat pelayanan perangkat daerah yang ditinjau dari sasaran jangka menengah Rencana Strategis Kementerian/Lembaga yaitu: kurangnya kuantitas dan kualitas aparatur, belum memadainya anggaran, sarana dan prasarana, masih kurangnya penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman, perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran. Sedangkan faktor pendorongnya, keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran diakui secara tegas dalam peraturan perundang-undangan.

3.1.2. Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029; telah ditetapkan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih periode 2025-2029 menjadi Visi, Misi, dan Program Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029. Visi pembangunan daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 adalah :

“SUMATERA BARAT MADANI YANG MAJU DAN BERKEADILAN”

Visi ini memuat tiga kata kunci utama yang menjadi dasar pijakan arah pembangunan lima tahun ke depan, yaitu Madani, Maju, dan Berkeadilan. Ketiga kata ini memiliki makna strategis dan nilai filosofis yang kuat sebagai refleksi dari identitas, potensi, dan harapan masyarakat Sumatera Barat di masa depan.

MADANI

Dalam konteks pembangunan “madani” mencerminkan masyarakat berperadaban tinggi, menjunjung nilai-nilai etika, moral, dan spiritual, serta menjaga harmoni sosial, hidup dalam keteraturan, menghargai hak dan kewajiban, dan mengedepankan prinsip musyawarah dan mufakat.

Selain itu, madani juga mencerminkan bahwa masyarakat hidup dengan berbasiskan pada kearifan lokal, yakni masyarakat yang memelihara adat dan budaya Minangkabau yang berlandaskan filosofi “Adaik Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah (ABS-SBK)”.

Madani juga menunjukkan kondisi masyarakat yang maju secara sosial dan spiritual, tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata tetapi juga keseimbangan nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan. Dengan demikian, Sumatera Barat Madani adalah daerah yang menjadikan nilai-nilai keagamaan dan adat sebagai fondasi kehidupan sosial dan pemerintahan yang adil, beretika, dan bermartabat.

MAJU

Kata maju dalam visi ini dimaknai sebagai kondisi pembangunan daerah yang berdaya saing tinggi, baik dalam skala nasional maupun internasional melalui penguatan kualitas sumber daya manusia, teknologi, inovasi, dan infrastruktur. Maju juga menunjukkan konsep pembangunan yang berkelanjutan dimana pembangunan ekonomi dilakukan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup dan sosial budaya masyarakat.

Maju juga mencerminkan modern namun tetap berakar pada nilai tradisional, yang berarti tidak meninggalkan identitas lokal dalam proses pembangunan. Sehingga kemajuan pembangunan diharapkan mencakup peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh pendidikan, kesehatan, ekonomi, serta kapasitas daya saing daerah di berbagai bidang strategis.

BERKEADILAN

Keadilan dalam konteks pembangunan tidak hanya bermakna persamaan formal, tetapi juga keadilan substantif yang mencakup terjadinya **Pemerataan hasil pembangunan** antar wilayah, antar kelompok sosial, dan antar sektor, sehingga tidak ada daerah atau kelompok masyarakat yang tertinggal, terjadinya **Kesempatan yang setara** dalam mengakses pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur serta terwujudnya **Pemberdayaan kelompok rentan**, termasuk perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat untuk terlibat aktif dalam pembangunan. Berkeadilan juga mencerminkan semangat inklusivitas dan keberpihakan terhadap kelompok marjinal, serta pengambilan kebijakan berbasis data dan prinsip *no one left behind*.

Sedangkan Misi pembangunan daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

- 1) Misi 1. Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas
- 2) Misi 2. Lumbung Pangan Nasional dan Ekonomi Berkelanjutan
- 3) Misi 3. Nagari/Desa sebagai basis Kemajuan
- 4) Misi 4. Sumatera Barat Pusat Perdagangan dan Bisnis Sumatera Bagian Barat
- 5) Misi 5. Membangun Infrastruktur Berkeadilan dan Siap Tanggap Bencana
- 6) Misi 6. Membangun Kehidupan Beradat dan Berbudaya Berbasis Agama, Kearifan Lokal Melalui Dukungan Keluarga Yang Berkualitas
- 7) Misi 7. Tingkatkan Daya Saing Pariwisata dan Akselerasi Ekonomi Kreatif Untuk UMKM
- 8) Misi 8. Tata Kelola Pemerintahan Bersih dan Pelayanan Publik yang Efektif

Berdasarkan visi dan misi diatas, maka Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang yang mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang ketertiban berdasarkan visi dan misi diatas, maka Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang yang mempunyai tugas pokok yaitu membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat akan melaksanakan **misi keenam**, yaitu: ***Membangun Kehidupan Beradat dan Berbudaya Berbasis Agama, Kearifan Lokal Melalui Dukungan Keluarga Yang Berkualitas***. Dengan tujuan, yaitu: Terwujudnya masyarakat beradat dan berbudaya yang harmonis, religius, serta berbasis keluarga berkualitas. Selanjutnya sasarannya yaitu: Terwujudnya lingkungan sosial yang aman dan harmonis berbasis keluarga berkualitas.

Sehubungan hal diatas, maka pelayanan perangkat daerah yang terkait yaitu upaya penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, menyelenggarakan perlindungan masyarakat, pembinaan pemadamaan kebakaran, pemenuhan standar pelayanan minimal urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta tata pemerintahan yang baik dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. Faktor-faktor penghambat pelayanan perangkat daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yaitu: kurangnya kuantitas dan kualitas aparatur, masih kurangnya kepatuhan masyarakat, aparatur dan badan hukum terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta masih terjadinya pelanggaran norma agama, adat dan budaya kemudian adanya potensi gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, kurangnya penyelenggaraan perlindungan masyarakat serta penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran di tingkat

kabupaten/kota belum terpenuhi. Sedangkan faktor pendorongnya, keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang diakui secara tegas dalam peraturan perundang-undangan.

3.1.3. Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Kota Padang Panjang Tahun 2026

Tujuan dan sasaran pembangunan dirumuskan untuk memberikan arah dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah serta nantinya akan menjadi dasar dalam mengukur kinerja pembangunan secara keseluruhan. Tujuan dan sasaran pembangunan dalam RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2026 mengacu pada Renstra PD Kota Padang Panjang 2025-2029.

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan secara keseluruhan. Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah diterjemahkan kedalam sasaran antara secara tahunan melalui arah kebijakan dan dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan prioritas dan sasaran pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah maupun perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah.

Target dari tujuan dan sasaran pembangunan RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2026 dirumuskan dengan berdasarkan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029, hasil evaluasi pembangunan tahun 2024, serta kebijakan pembangunan nasional tahun 2025. Berikut dijelaskan penjabaran Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Padang Panjang Tahun 2026.

Tabel 3.1
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2025-2029

Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
PADANG PANJANG KOTA SERAMBI MEKAH YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN BERMARWAH											
Misi 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas, Kreatif, Inovatif Berakhlak dan Berdaya Saing Tinggi	T1 : Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing		Indeks Pembangunan Manusia	Angka	80,60	81,50	82,40	83,30	84,20	85,10	86,00
		S1.1 : Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	Harapan Lama Sekolah	Tahun	15,47	15,67	15,85	16,02	16,19	16,37	16,54
			Rata-Rata lama Sekolah	Tahun	12,00	12,16	12,30	12,43	12,57	12,70	12,84
			Indeks pembangunan literasi masyarakat	Angka	96,78	97,88	97	97,3	97,5	98	98,5
			Usia Harapan Hidup	Tahun	74,48	76,17	77,01	77,85	78,69	79,53	80,37
			Indeks Pembangunan Pemuda	Angka	55,67	55,77	55,87	55,97	56,07	56,17	56,27
		S1.2 : Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olah raga	Rasio Daya Saing Keolahragaan	%	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,2
		S1.3 Meningkatnya pembangunan kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Angka	66,6	70	71	72	73	74	75
			Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	Angka	66,46	66,56	66,66	66,76	66,86	66,96	67,06
			Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	98,23	98,25	98,35	98,45	98,5	98,6	98,65
Misi 2 : Meningkatkan Perekonomian Daerah yang berkelanjutan berbasis Potensi Lokal	T2 : Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan		Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,52	5,15	5,95	7,12	7,31	7,65	6,22
			Pengeluaran Perkapita	Rp. Juta	11.840	11.643	11.771	11.900	12.029	12.157	12.286
			Tingkat Kemiskinan	%	5,31	5,10	4,89	4,08	3,27	2,46	1,65

		S2.1 : Meningkatnya pertumbuhan Ekonomi berbasis Potensi Lokal	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	8,3	9,54	10,734	11,928	12,122	13,316	14,51	
			Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	%	2,89	2,94	2,998	3,056	3,114	3,172	3,23	
			Rasio PDRB Ekonomi Kreatif	%	5,1	5,38	5,6	5,82	6,03	6,15	6,26	
			Rasio PDRB Perdagangan Besar, kecil dan Eceran	%	18,28	18,35	18,43	18,5	18,58	18,65	18,73	
			Rasio PDRB Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan	%	4,99	5,2	5,26	5,32	5,38	5,44	5,5	
			Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,2	0,29	0,312	0,334	0,356	0,378	0,4	
			Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	%	29,55	30,19	30,34	30,49	30,64	30,79	30,94	
			Nilai Investasi	Milyar	39,96	44,75	75 M	100 M	42.75 M	76.5 M	68.4 M	
			S2.2 : Meningkatnya ketahanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks							
			S2.3 : Meningkatnya upaya penurunan tingkat kemiskinan	Jumlah penduduk miskin	ribu orang	3060	2714	2368	2023	1671	1325	980
		S2.4 : Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,94	4,48	3,784	3,088	2,392	1,696	1,05	
			Tingkat produktivitas tenaga kerja	Rp. Juta/ Tenaga Kerja	108,5	137,78	140,78	143,78	146,78	149,78	152,78	
Misi 3 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang melayani, akuntabel, profesional, transparan dan inovatif	T3 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani		Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	77,66	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	90,00	
		S3.1 : Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Angka	3,14 (Thn 2023)	3,38	3,386	3,392	3,398	3,404	3,41	
			Indeks Pelayanan Publik	Angka	4,17	4,2	4,22	4,24	4,26	4,28	4,3	
			Indeks Reformasi Hukum	Angka	96,66	96,82	97,4	97,7	98,4	98,7	98,9	
			Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Angka	72,2	71,00	72,00	73	74	75	76	

			Indeks Inovasi Daerah	Angka	81,35 (Sangat inovatif)	82,22 (Sangat inovatif)	82,81 (Sangat inovatif)	84,41 (Sangat inovatif)	86 (Sangat inovatif)	87,59 (Sangat Inovatif)	89,34 (Sangat inovatif)
			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Angka	63,19	68,4	73,5	77,6	82,1	84,4	85,5
			Nilai SAKIP Kota	Angka	64,22	66,85	69,48	72,11	74,74	77,37	80
			Indeks Pemerintahan Digital (Indeks SPBE)	Angka	3,16	3,3	3,45	3,59	3,73	3,87	4,00
		S3.2 : Meningkatkan profesionalisme ASN	Nilai Integritas (Survey Penilaian Integritas KPK)	Angka	78,03	78,5	79	79,5	80	80,5	81
			Indeks Profesionalitas ASN	Angka	85,1	86,4	87,2	87,7	88,4	85,8	86,9
Misi 4 : Mewujudkan Masyarakat Kota Padang Panjang yang Rukun, Aman, Berbudaya dan berkarakter Berbasis Nilai Agama, Adat Istiadat	T4 : Terwujudnya keamanan masyarakat, perlindungan sosial, Internalisasi serta Aktualisasi Nilai Nilai Agama dan Budaya dalam kehidupan masyarakat		Indeks Rasa Aman	Angka	86,04	86,2	86,39	89,09	91,78	91,88	92
			Persentase mesjid yang aktif melaksanakan aktifitas keagamaan	%	85,00	88,00	90,00	93,00	95,00	98,00	100,00
		S4.1 : Meningkatnya internalisasi nilai-nilai Agama dan Adat dalam masyarakat	Persentase pemajuan objek kebudayaan	%	66,16	66,60-67,07	67,22-67,72	67,84-68,38	68,46-69,03	69,08-69,69	69,70-70,34
		S4.2 : Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase penurunan pelanggaran Perda	%	2,4	2,5	2,55	2,6	2,65	2,7	2,75
			Persentase Konflik sosial yang tertangani	%	100	100	100	100	100	100	100
		S4.3 : Meningkatnya perlindungan sosial terhadap masyarakat	Angka PPKS	Angka	3,69	3,34	3,21	3,1	2,9	2,75	2,5
Misi 5 : Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Untuk Menjadikan Padang Panjang Kota Hijau Berkelanjutan	T5 : Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan		Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	Angka	95,5	95,6	95,7	95,8	95,9	96	96,1
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	62,62	74,34	74,45	74,56	74,67	74,78	74,89
		S5.1 : Meningkatnya penyediaan dan pengelolaan infrastruktur berkualitas	IKLI KePUan	Angka	96,71	96,81	96,91	97,01	97,11	97,21	97,31
			IKLI perkim	Angka	94,56	96,92	96,95	97,15	97,35	97,55	97,75

			IKLI Perhubungan	Angka	95,22	96,83	96,9	97,02	97,09	97,16	97,23
		S5.2 : Terpenuhinya akses hunian layak terjangkau dan berkelanjutan	Persentase Rumah Tangga dengan akses hunian layak dan terjangkau dan berkelanjutan	%	71,28	73,63	75,974	78,318	80,662	83,006	85,35
		S5.3 : Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	IKU	Angka	89,08	78,68	78,78	78,88	78,98	79,08	79,18
			IKA	Angka	34,65	72,47	72,62	72,77	72,92	73,07	73,22
			IKL	Angka	61,7	69,51	69,58	69,65	69,71	69,78	69,85
		S5.4 : Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Angka	0,30						

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kota Padang Panjang, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang berkontribusi untuk mewujudkan Tujuan yang ada dalam Renstra PD. Visi dan misi Kota Padang Panjang mencerminkan visi dan misi pasangan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih. Cita-cita pembangunan Kota Padang Panjang yang termaktub dalam RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 yaitu:

“Padang Panjang Kota Serambi Mekah yang Maju, Sejahtera, dan Bermarwah”

Visi diatas menjelaskan terkait Mewujudkan Masyarakat Kota Padang Panjang yang Rukun, Aman, Berbudaya dan berkarakter Berbasis Nilai Agama, Adat Istiadat. Visi di atas menjadi dasar perumusan Misi RPJMD Kota Padang Panjang tahun 2025-2029.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang memiliki keterkaitan dengan Misi ke 4 yaitu *“Mewujudkan Masyarakat Kota Padang Panjang yang Rukun, Aman, Berbudaya dan berkarakter Berbasis Nilai Agama, Adat Istiadat”* Tujuan ke 4 yaitu *“Terwujudnya keamanan masyarakat, perlindungan sosial, Internalisasi serta Aktualisasi Nilai Nilai Agama dan Budaya dalam kehidupan masyarakat”* dan Sasaran ke 13 yaitu *“Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum”* dari RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang berperan untuk meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum. Oleh karena itu Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang perlu mengidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendorong pelayanan terhadap pencapaian visi dan misi

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagai lembaga teknis ketentraman dan ketertiban umum, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang mempunyai kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029. Dengan adanya kontribusi tersebut, diharapkan dari aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum, dapat diwujudkan bersama seluruh *stakeholder*.

3.1.4. Telaahan Renstra Kementerian/ Lembaga dan Renstra Provinsi

1. Telaahan Renstra Kementerian /Lembaga

Telaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang yaitu telaahan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia khususnya Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2025-2029. Sasaran strategis Kementerian/Lembaga tersebut yaitu meningkatnya kualitas penyelenggaraan Trantibumlinmas. Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa dengan

Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Sasaran Kegiatan yaitu Meningkatnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat dan Damkar sesuai standar.

Berdasarkan hal tersebut diatas, bahwa kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang yaitu Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Kemudian faktor-faktor penghambat pelayanan perangkat daerah yang ditinjau dari sasaran jangka menengah Rencana Strategis Kementerian/Lembaga yaitu: kurangnya kuantitas dan kualitas aparatur, belum memadainya anggaran, sarana dan prasarana, masih kurangnya penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman, perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran. Sedangkan faktor pendorongnya, keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang diakui secara tegas dalam peraturan perundang-undangan.

2. Telaahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi Sumatera Barat

Untuk pencapaian tujuan penataan ruang Provinsi Sumatera Barat ditetapkan prioritas penataan ruang Sumatera Barat sebagai berikut :

1. Meningkatkan daya dukung lingkungan melalui perwujudan 45% kawasan lindung, mempertahankan sawah beririgasi teknis, mengurangi pencemaran perkotaan dan mengarahkan kegiatan sesuai alokasi pemanfaatan ruang.
2. Pemerataan pembangunan dengan mengarahkan kegiatan pada wilayah yang didorong dan ditingkatkan perkembangannya.
3. Meningkatkan jasa pelayanan perhubungan, ekonomi, kesehatan, budaya dan olahraga.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan sarana dan prasarana permukiman.
5. Mendorong kerjasama pembangunan inter dan antar wilayah.
6. Meningkatkan pembangunan yang berbasis mitigasi bencana.
7. Meningkatkan kerjasama pembangunan di daerah perbatasan antar Provinsi.

Penataan ruang yang berkelanjutan diselenggarakan dengan menjalin kelestarian dan kelangsungan ekosistem alam dan daya dukung serta daya tampung wilayah dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati serta kepentingan generasi masa yang akan datang. Berdasarkan hal tersebut

didasar, bahwa perlu peningkatan penegakan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Kemudian faktor-faktor penghambat pelayanan perangkat daerah yaitu: belum memadainya sarana dan prasarana, masih terjadinya gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dan masih kurangnya kabupaten/kota dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat. Sedangkan faktor pendorongnya, keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat diakui secara tegas dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Identifikasi permasalahan sebelumnya dapat dirumuskan Isu Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Penegakan semua Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah yang mempunyai sanksi hukum kurang optimal
2. Masih adanya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang terjadi
3. Penyelenggaraan perlindungan masyarakat kurang maksimal
4. Kurang terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur, kuantitas dan kualitas aparatur serta penerapan standar pelayanan minimal urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
5. Pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran yang kurang maksimal

Penyelenggaraan tata pemerintahan seperti pelayanan, pengelolaan keuangan, perencanaan dan kapasitas sumber daya aparatur untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi jika ditinjau baik dari segi kualitas maupun kuantitas pada saat ini kurang memadai

3.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang yang telah dituangkan sebelumnya pada Bab III, maka dirumuskanlah tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 yang menjadi Tugas Pokok dan Fungsi melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban umum.

Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah terpilih, maka dirumuskan tujuan dan sasaran perangkat daerah dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan dan sasaran merupakan salah satu komponen dari perencanaan strategis, yang menunjukkan hal-hal yang akan dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi Kepala Daerah terpilih selama kurun waktu

lima tahun kedepan. Tujuan dan sasaran pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum
Sasaran yang hendak dicapai dari tujuan tersebut adalah :
 - a. Meningkatkan kualitas pencegahan dan penanganan gangguan trantibum linmas dan penegakan perda.
 - b. Meningkatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Sasarannya "Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah".

Untuk lebih jelasnya tujuan, sasaran serta indikator masing-masing sasaran dan target kinerja tahunan dapat dijelaskan melalui Tabel berikut.

Tabel. 3.2
Tujuan dan Sasaran
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2026

No.	NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Renstra 2026	Target Renja Perubahan 2026
1	NSPK tentang Satpol PP (PP No.16 Tahun 2018 dan tentang SPM PP No.2 Tahun 2018 dan Permendagri No.114 Tahun 2018 Sasaran 4.1 RPJMD : Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum		Persentase penurunan pelanggaran Perda	2,55	2,55
2			1. Meningkatnya kualitas pencegahan dan penanganan gangguan trantibum linmas dan penegakan perda	Persentase Penyelenggaraan Trantibumlinmas	100%	100%
			2. Meningkatnya pelayanan pencegahan, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (Respon time) Daerah Layanan WMK	100%	100%
			3. Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	65,40	65,40

3.3. Program dan Kegiatan

Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun 2026 antara lain adalah:

1. Penetapan tujuan dan sasaran strategis yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029.
2. Penetapan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029
3. Evaluasi Pelaksanaan RPJMD tahun kelima, serta Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang sampai dengan Tahun 2024.
4. Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan fungsi dan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - b. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 4) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - c. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
 - 2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
 - a. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum

- 2) Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan
 - 3) Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penetapan dan Penanganan Unjuk rasa dan Kerusuhan Masa
 - 4) Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah
 - 5) Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum
- b. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
 - 1) Sosialisasi Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 - 2) Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah
 - c. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota
 - 1) Pengembangan Kapasitas dan karier PPNS
3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
 - a. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran
 - 2) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
 - 3) Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga
 - 4) Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
 - 1) Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan penanggulangan Kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat
 - 2) Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran
 - c. Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia
 - 1) Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia
 - 2) Pengadaan sarana dan prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap kondisi Membahayakan manusia/penyelamatan dan edukasi

Program dan kegiatan berdasarkan indikator kinerja dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026
Dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kota Padang Panjang

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					9.977.765.786				10.856.750.147
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					9.977.765.786				10.856.750.147
PERENCANAAN					9.977.765.786				10.856.750.147
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Kota Padang Panjang	100 Persen	6.667.851.736	DAU		100 Persen	6.753.000.993
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Padang Panjang	90 Persen	5.943.220.000	DAU		90 Persen	6.061.678.993
1.05.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Padang Panjang	574 Orang/bulan	5.907.100.000	DAU		574 Orang/bulan	6.061.678.993
1.05.01.2.02.003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Padang Panjang	1 Orang/bulan	36.120.000			1 Orang/bulan	36.120.000
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	Kota Padang Panjang	90 Persen	107.507.000	DAU		90 Persen	113.715.000
1.05.01.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Padang Panjang	4 paket	2.500.000	PBJT Atas Tenaga Listrik		12 paket	2.715.000
1.05.01.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Padang Panjang	4 paket	15.000.000	DAU		12 paket	15.000.000
1.05.01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Padang Panjang	4 paket	10.007.000	DAU		12 paket	10.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.05.01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Padang Panjang	20 laporan	80.000.000	Pendapatan Transfer/ Transfer antar Daerah/ Bagi Hasil Pajak Bahan		20 laporan	86.000.000
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	Kota Padang Panjang	90 Persen	536	DAU		90 Persen	2.000.000
1.05.01.2.07.002	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Unit Kendaraan Dinas/Operasional yang Disediakan	Kota Padang Panjang	1 unit	436	DAU		1 unit	1.000.000
1.05.01.2.07.006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Padang Panjang	1 unit	100	DAU		11 unit	1.000.000
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kota Padang Panjang	100 Persen	100.000	DAU		100 Persen	1.128.000
1.05.01.2.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Padang Panjang	172 paket	100.000	DAU		172 Paket	1.128.000
X..XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	Kota Padang Panjang	90 Persen	111.744.800	DAU		90 Persen	147.200.000
X..XX.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Padang Panjang	12 Laporan	4.004.800	DAU		12 Laporan	4.000.000
X..XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Padang Panjang	36 Laporan	25.000.000	DAU		36 Laporan	25.000.000
X..XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Padang Panjang	12 Laporan	82.740.000	DAU		12 Laporan	118.200.000
X..XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	Kota Padang Panjang	90 Persen	505.279.400	DAU		90 Persen	452.279.000
X..XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Padang Panjang	24 Unit	445.279.000	Opsen PKB & BBNKB		26 Unit	392.279.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
X..XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Padang Panjang	30 Unit	20.012.400	DAU		30 Unit	20.000.000
X.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Padang Panjang	2 Unit	39.988.000	DAU		2 Unit	40.000.000
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase warga negara yang terlindungi dari dampak pelanggaran perda dan trantibum	Kota Padang Panjang	100 Persen	2.968.423.900	PAD		100 Persen	3.575.469.000
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah operasi pencegahan dan penanganan gangguan trantibum	Kota Padang Panjang	5 operasi	2.603.047.400	PAD		4 operasi	3.553.000.000
1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kota Padang Panjang	1 Dokumen	100	PAD		1 dokumen	1.000.000
1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Tenaga Kontrak Banpol PP yang disiapkan untuk Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kota Padang Panjang	55 laporan	2.602.980.000	PAD		55 laporan	3.549.000.000
1.05.02.2.01.0016	Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penetiban dan penganan unjuk rasa dan kerusuhan masa	Jumlah Laporan Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penetiban dan penganan unjuk rasa dan kerusuhan masa	Kota Padang Panjang	2 laporan	150	PAD		1 Laporan	1.000.000
1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah	Jumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga yang terdampak Penegakan Perda dan Perkada	Kota Padang Panjang	2 laporan	250	PAD		2 laporan	1.000.000
1.05.02.2.01.0018	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah sarana dan prasarana ketenteraman dan ketertiban umum yang tersedia	Kota Padang Panjang	1 unit	66.900	PAD		22 unit	1.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.05.02.2.02.	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah operasi penegakan Perda	Kota Padang Panjang	2 operasi	365.376.400	PAD		2 operasi	21.469.000
1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kota Padang Panjang	1 Laporan	26.326.000	PAD		1 Laporan	20.469.000
1.05.02.2.02..0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Kota Padang Panjang	8 Laporan	339.050.000	Pajak Rokok		6 Laporan	1.000.000
1.05.02.2.03	Pembinaan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota	Jumlah Kegiatan Pembinaan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota	Kota Padang Panjang	1 kegiatan	100	PAD		1 kegiatan	1.000.000
1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan karier PPNS	Jumlah laporan hasil pengembangan dan peningkatan kapasitas pejabat PPNS Penegak Perda	Kota Padang Panjang	1 Laporan	100	PAD		1 Laporan	1.000.000
1.05.04.	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Waktu tanggap (Respon Time Rate) Daerah	Kota Padang Panjang	10 Menit	341.490.150	PAD		10 Menit	467.160.154
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis kegiatan pencegahan pengendalian pemadaman kebakaran	Kota Padang Panjang	4 kegiatan	287.980.450	PAD		3 kegiatan	411.650.000
1.05.04.2.01.0007	Pembinaan aparatur pemadam kebakaran	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memiliki sertifikasi keterampilan teknis dan analisis dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran	Kota Padang Panjang	1 orang	8.500.000	PAD		2 orang	8.500.000
1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Kota Padang Panjang	1 unit	350	PAD		1 unit	1.000.000
1.05.04.2.01.0019	Pelatihan keluarga tanggap kebakaran rumah tangga	Jumlah keluarga mengikuti pelatihan keluarag tanggap kebakaran rumah tangga	Kota Padang Panjang	10 keluarga	100	PAD		10 keluarga	1.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.05.04.2.01.0026	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang	15 Laporan	279.480.000	PAD		15 Laporan	402.150.000
1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah kegiatan pemberdayaan	Kota Padang Panjang	2 kegiatan	49.974.700	PAD		3 kegiatan	51.010.154
1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan penanggulangan Kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	Jumlah sekolah yang mendapatkan sosialisasi dan edukasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran tiap tahunnya	Kota Padang Panjang	50 orang	17.405.000	PAD		50 orang	17.400.000
1.05.04.2.04.0001	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	Kota Padang Panjang	16 Desa/Kelurahan	32.569.100	PAD		16 Desa/Kelurahan	32.610.154
1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Kota Padang Panjang	100 Persen	3.535.000	PAD		100 Persen	4.500.000
1.05.04.2.05.0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	Kota Padang Panjang	12 Laporan	3.500.000	PAD		12 Laporan	3.500.000
1.05.04.2.05.0005	Pengadaan sarana dan prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap kondisi Membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan terhadap kondisi Membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi sesuai dengan standar teknis	Kota Padang Panjang	1 unit	35.000	PAD		1 unit	1.000.000

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun 2026 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Dalam merumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempelajari RKPDP Kota Padang Panjang Tahun 2026 serta Reviu Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029;
2. Mendukung pencapaian Tujuan dan sasaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024 - 2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Padang Panjang Tahun 2026. Secara umum Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran bertugas menkoordinasikan pencapaian 1 (satu) indikator tujuan dan 1 (satu) indikator sasaran pembangunan daerah. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan "Indeks rasa Aman" dengan indikator sasaran "Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketertarikan dan Ketertiban Umum";
3. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang
4. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program /kegiatan/sub kegiatan;
5. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program /kegiatan/sub kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Secara rinci rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun 2026 sebagaimana table 4.1 berikut :

Tabel 4.1
Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD)
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang
Tahun 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
												NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN							9.977.765.786							10.820.630.147	SATPOL PP
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						9.305.634.586							10.109.023.147	SATPOL PP	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						9.305.634.586							10.109.023.147	SATPOL PP	
1.	1,05,01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						5.995.720.536						-	6.066.393.993	SATPOL PP	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	%	100	100	100	100	5.995.720.536	-	-	-	-	-	100 Persen	6.066.393.993	SATPOL PP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
												NASIONAL	DAERAH				
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	5.943.220.000			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya keamanan masyarakat, perlindungan sosial, internalisasi serta Aktualisasi Nilai Nilai Agama dan Budaya dalam kehidupan masyarakat	-	100 persen	6.061.678.993	SATPOL PP
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang /Bulan	4128	688	688	688	5.907.100.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya keamanan masyarakat, perlindungan sosial, internalisasi serta Aktualisasi Nilai Nilai Agama dan Budaya dalam kehidupan masyarakat	-		6.061.678.993	SATPOL PP
	1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	60	0	0	12	36.120.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya keamanan masyarakat, perlindungan sosial, internalisasi serta Aktualisasi Nilai Nilai Agama dan Budaya dalam kehidupan masyarakat	-		-	SATPOL PP
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	2.500.000			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya keamanan masyarakat, perlindungan sosial, internalisasi serta Aktualisasi Nilai Nilai Agama dan Budaya dalam kehidupan masyarakat	-	100 persen	2.715.000	SATPOL PP
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	24	4	4	4	2.500.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya keamanan masyarakat, perlindungan sosial, internalisasi serta Aktualisasi Nilai Nilai Agama dan Budaya dalam kehidupan masyarakat	-		2.715.000	SATPOL PP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAN AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
												NASIONAL					DAERAH
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan Perencanaan	%	100	100	100	100	536			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya keamanan masyarakat, perlindungan sosial, internalisasi serta Aktualisasi Nilai Agama dan Budaya dalam kehidupan masyarakat	-	100 persen	2.000.000	SATPOL PP
	1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas/Operasional yang Disediakan	Unit	5	0	0	1	436	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya keamanan masyarakat, perlindungan sosial, internalisasi serta Aktualisasi Nilai Agama dan Budaya dalam kehidupan masyarakat	-		1.000.000	SATPOL PP
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	32	0	4	11	100	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya keamanan masyarakat, perlindungan sosial, internalisasi serta Aktualisasi Nilai Agama dan Budaya dalam kehidupan masyarakat	-		1.000.000	SATPOL PP
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Berkondisi Baik	%	100	100	100	100	50.000.000			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya keamanan masyarakat, perlindungan sosial, internalisasi serta Aktualisasi Nilai Agama dan Budaya dalam kehidupan masyarakat	-	100 persen	-	SATPOL PP
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	2	0	0	2	50.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya keamanan masyarakat, perlindungan sosial, internalisasi serta Aktualisasi Nilai Agama dan Budaya dalam kehidupan masyarakat	-		-	SATPOL PP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
												NASIONAL					DAERAH
2,	1,05,02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							2.968.423.900					-	3.597.938.000	SATPOL PP	
		Meningkatkan kualitas pencegahan dan penanganan gangguan trantibum linmas dan penegakan PERDA	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	%	100	100	100	100	2.968.423.900					77 Persen	3.597.938.000	SATPOL PP	
			Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	%	80	74	75	76						60 Persen		SATPOL PP	
			Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	%	70	0	0	50						100 Persen		SATPOL PP	
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Operasi Pencegahan dan Penanganan Gangguan Trantibum	Operasi	35	2	2	5	2.603.047.400					5 operasi	3.553.000.000	SATPOL PP	
											Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya keamanan masyarakat, perlindungan sosial, internalisasi serta Aktualisasi Nilai Nilai Agama dan Budaya dalam kehidupan masyarakat					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
												NASIONAL					DAERAH
	1.05.02.2.01. 0004	Pemberdayaan Perfindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	5	2	0	1	100	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya keamanan masyarakat, perlindungan sosial, internalisasi serta Aktualisasi Nilai Nilai Agama dan Budaya dalam kehidupan masyarakat	-	1.000.000	SATPOL PP	
	1.05.02.2.01. 0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Laporan	330	102	55	55	2.602.980.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya keamanan masyarakat, perlindungan sosial, internalisasi serta Aktualisasi Nilai Nilai Agama dan Budaya dalam kehidupan masyarakat	-	3.549.000.000	SATPOL PP	
	1.05.02.2.01. 0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Laporan	6	0	0	2	150	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya keamanan masyarakat, perlindungan sosial, internalisasi serta Aktualisasi Nilai Nilai Agama dan Budaya dalam kehidupan masyarakat	-	1.000.000	SATPOL PP	
	1.05.02.2.01. 0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Laporan	18	8	8	2	250	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya keamanan masyarakat, perlindungan sosial, internalisasi serta Aktualisasi Nilai Nilai Agama dan Budaya dalam kehidupan masyarakat	-	1.000.000	SATPOL PP	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAN AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
												NASIONAL					DAERAH
	1.05.02.2.01.0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Unit	52	0	0	1	66.900	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya keamanan masyarakat, perlindungan sosial, internalisasi serta Aktualisasi Nilai Nilai Agama dan Budaya dalam kehidupan masyarakat	-	1.000.000	SATPOL PP	
	1.05.02.2.02	Pengakuan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Operasi Pengakuan Perda	Operasi	17	1	2	2	365.376.400			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya keamanan masyarakat, perlindungan sosial, internalisasi serta Aktualisasi Nilai Nilai Agama dan Budaya dalam kehidupan masyarakat	-	3 operasi	21.469.000	SATPOL PP
	1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Pengakuan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Pengakuan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	5	0	0	1	26.326.400	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya keamanan masyarakat, perlindungan sosial, internalisasi serta Aktualisasi Nilai Nilai Agama dan Budaya dalam kehidupan masyarakat	-	20.469.000	SATPOL PP	
	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Laporan	34	8	2	8	339.050.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya keamanan masyarakat, perlindungan sosial, internalisasi serta Aktualisasi Nilai Nilai Agama dan Budaya dalam kehidupan masyarakat	-	1.000.000	SATPOL PP	
	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota	Kegiatan	2	0	0	1	100			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya keamanan masyarakat, perlindungan sosial, internalisasi serta Aktualisasi Nilai Nilai Agama dan Budaya dalam kehidupan masyarakat	-	1 kegiatan	1.000.000	SATPOL PP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
												NASIONAL					DAERAH
	1.05.02.2.03. 0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Laporan	3	0	0	1	100	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya keamanan masyarakat, perlindungan sosial, internalisasi serta Aktualisasi Nilai Nilai Agama dan Budaya dalam kehidupan masyarakat	-	1.000.000	SATPOL PP	
3.	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN N KEBAKARAN							341.490.150					-	467.160.154	SATPOL PP	
		Meningkatnya pelayanan pencegahan, penyelamatan, dan evakuasi korban kebakaran	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	%	95	0	0	20	341.490.150					100 Persen	467.160.154	SATPOL PP	
			Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	%	100	0	0	100		-	-	-	-	100 Persen		SATPOL PP	
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis kegiatan Pencegahan Pengendalian Pemadaman Kebakaran	Jenis Kegiatan	26	1	2	4	287.980.450			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya keamanan masyarakat, perlindungan an sosial, Internalisasi serta Aktualisasi Nilai Nilai Agama dan Budaya dalam kehidupan masyarakat	-	5 Kegiatan	412.650.000	SATPOL PP
	1.05.04.2.01. 0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Orang	13	0	0	1	8.500.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta perin gkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya keamanan masyarakat, perlindungan sosial, Internalisasi serta Aktualisasi Nilai Nilai Agama dan Budaya dalam kehidupan masyarakat	-	8.500.000	SATPOL PP	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
												NASIONAL					DAERAH
	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Unit	36	0	4	1	350	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya keamanan masyarakat, perlindungan sosial, internalisasi serta Aktualisasi Nilai Agama dan Budaya dalam kehidupan masyarakat	-	1.000.000	SATPOL PP	
	1.05.04.2.01.0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	Keluarga	58	0	0	10	100	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya keamanan masyarakat, perlindungan sosial, internalisasi serta Aktualisasi Nilai Agama dan Budaya dalam kehidupan masyarakat	-	1.000.000	SATPOL PP	
	1.05.04.2.01.0026	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	75	12	15	15	279.480.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya keamanan masyarakat, perlindungan sosial, internalisasi serta Aktualisasi Nilai Agama dan Budaya dalam kehidupan masyarakat	-	402.150.000	SATPOL PP	
	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	Kegiatan	11	0	1	1	49.974.700			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya keamanan masyarakat, perlindungan sosial, internalisasi serta Aktualisasi Nilai Agama dan Budaya dalam kehidupan masyarakat	-	2 kegiatan	50.010.154	SATPOL PP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
												NASIONAL					DAERAH
	1.05.04.2.04. 0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	Orang	250	0	0	50	17.405.600	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya keamanan masyarakat, perlindungan sosial, internalisasi serta Aktualisasi Nilai Agama dan Budaya dalam kehidupan masyarakat	-		17.400.000	SATPOL PP
	1.05.04.2.04. 0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	Kelurahan	96	0	16	16	32.569.100	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya keamanan masyarakat, perlindungan sosial, internalisasi serta Aktualisasi Nilai Agama dan Budaya dalam kehidupan masyarakat	-		32.610.154	SATPOL PP
	1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Persentase pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia	Persen	100	100	100	100	3.535.000			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya keamanan masyarakat, perlindungan sosial, internalisasi serta Aktualisasi Nilai Agama dan Budaya dalam kehidupan masyarakat	-	100 persen	4.500.000	SATPOL PP
	1.05.04.2.05. 0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	Laporan	72	134	12	12	3.500.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya keamanan masyarakat, perlindungan sosial, internalisasi serta Aktualisasi Nilai Agama dan Budaya dalam kehidupan masyarakat	-		3.500.000	SATPOL PP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
												NASIONAL	DAERAH				
	1.05.04.2.05. 0005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	Unit	42	0	1	1	35.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya keamanan masyarakat, perlindungan sosial, internalisasi serta Aktualisasi Nilai Nilai Agama dan Budaya dalam kehidupan masyarakat	-		1.000.000	SATPOL PP
	X	NON URUSAN							672.131.200							711.607.000	SATPOL PP
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							672.131.200							711.607.000	SATPOL PP
1,	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							672.131.200					-		711.607.000	SATPOL PP
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	%	100	100	100	100	672.131.200							711.607.000	
	X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	100	0	100	100.000			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sambada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya keamanan masyarakat, perlindungan sosial, internalisasi serta Aktualisasi Nilai Nilai Agama dan Budaya dalam kehidupan masyarakat	-	100 persen	1.128.000	SATPOL PP
	X.XX.01.2.05. 0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	852	221	0	172	100.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sambada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya keamanan masyarakat, perlindungan sosial, internalisasi serta Aktualisasi Nilai Nilai Agama dan Budaya dalam kehidupan masyarakat	-		1.128.000	SATPOL PP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
												NASIONAL					DAERAH
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	105.007.000			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya keamanan masyarakat, perlindungan sosial, internalisasi serta Aktualisasi Nilai Nilai Agama dan Budaya dalam kehidupan masyarakat	-	100 persen	111.000.000	SATPOL PP
	X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	24	4	4	4	15.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya keamanan masyarakat, perlindungan sosial, internalisasi serta Aktualisasi Nilai Nilai Agama dan Budaya dalam kehidupan masyarakat	-		15.000.000	SATPOL PP
	X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	25	5	5	4	10.007.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya keamanan masyarakat, perlindungan sosial, internalisasi serta Aktualisasi Nilai Nilai Agama dan Budaya dalam kehidupan masyarakat	-		10.000.000	SATPOL PP
	X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	144	24	24	20	80.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PELAMPAJUAN PENERIMAAN PENDAPATAN TRANSFER	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya keamanan masyarakat, perlindungan sosial, internalisasi serta Aktualisasi Nilai Nilai Agama dan Budaya dalam kehidupan masyarakat	-		86.000.000	SATPOL PP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
												NASIONAL	DAERAH				
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi	%	100	100	100	100	111.744.800			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya keamanan masyarakat, perlindungan sosial, internalisasi serta Aktualisasi Nilai Nilai Agama dan Budaya dalam kehidupan masyarakat	-	100 persen	147.200.000	SATPOL PP
	X.XX.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	72	12	12	12	4.004.800	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya keamanan masyarakat, perlindungan sosial, internalisasi serta Aktualisasi Nilai Nilai Agama dan Budaya dalam kehidupan masyarakat	-		4.000.000	SATPOL PP
	X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	216	36	36	36	36 Laporan	25.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya keamanan masyarakat, perlindungan sosial, internalisasi serta Aktualisasi Nilai Nilai Agama dan Budaya dalam kehidupan masyarakat	-		25.000.000	SATPOL PP
	X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	72	12	12	12	82.740.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya keamanan masyarakat, perlindungan sosial, internalisasi serta Aktualisasi Nilai Nilai Agama dan Budaya dalam kehidupan masyarakat	-		118.200.000	SATPOL PP
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Berkondisi Baik	%	100	100	100	100	455.279.400			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya keamanan masyarakat, perlindungan sosial, internalisasi serta Aktualisasi Nilai Nilai Agama dan Budaya dalam kehidupan masyarakat	-	100 persen	452.279.000	SATPOL PP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
												NASIONAL	DAERAH				
	X.XX.01.2.09. 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	156	26	26	26	395.279.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya keamanan masyarakat, perlindungan sosial, internalisasi serta Aktualisasi Nilai Nilai Agama dan Budaya dalam kehidupan masyarakat	-	392.279.000	SATPOL PP	
	X.XX.01.2.09. 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	180	30	30	30	20.012.400	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya keamanan masyarakat, perlindungan sosial, internalisasi serta Aktualisasi Nilai Nilai Agama dan Budaya dalam kehidupan masyarakat	-	20.000.000	SATPOL PP	
	X.XX.01.2.09. 0009	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabili tasi	Unit	10	1	1	1	39.988.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya keamanan masyarakat, perlindungan sosial, internalisasi serta Aktualisasi Nilai Nilai Agama dan Budaya dalam kehidupan masyarakat	-	40.000.000	SATPOL PP	

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen penting dalam rangka mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat. Penyusunan Renja seharusnya mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development (CBD)* dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru. Semua itu akhirnya menuju pada proses menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya berkaitan langsung kepada masyarakat, sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun 2026 merupakan salah satu dokumen yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk tahun anggaran 2026. Perencanaan program dan kegiatan tersebut memperhatikan dan menganalisis isu-isu penting dalam pembangunan yang patut ditindaklanjuti. Selanjutnya, penyusunan program dan kegiatan pada Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun 2026 disusun berdasarkan indikator dan target kinerja serta pagu indikatif yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2026. Ketersediaan anggaran sesuai dengan pagu indikatif memerlukan komitmen semua pihak yang terkait dalam kegiatan perencanaan dan penganggaran sehingga program dan kegiatan yang diusulkan dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan. Namun hal ini bukan suatu kemutlakan, tentunya disesuaikan pula dengan kebutuhan prioritas pembangunan daerah serta ketersediaan dana.

Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun 2026 yang dilengkapi dengan indikator serta target pencapaian kinerja akan menjadi salah satu acuan dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang selama tahun 2026. Terlaksananya Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang sesuai dengan indikator dan target pencapaian kinerja tergantung kepada koordinasi dan komitmen seluruh pihak terkait pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang.

Padang Panjang, Agustus 2025
**Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Dan Pemadam Kebakaran
Kota Padang Panjang**


BENNY, S.STP.
NIP. 19840402 2002121005